

Prospek dan Strategi Pariwisata Halal Pada Masyarakat Mayoritas Non Muslim

Muhammad Akbar¹, Syahrir Mallongi²

¹UIN Alauddin Makassar

²Universitas Muslim Indonesia

Jl. Sultan Alauddin No. 63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan

E-mail : bungakbar71@gmail.com

Abstrak,

Berbagai segmen dari pariwisata terus bermunculan salah satu adalah pariwisata halal. Namun sejak kemunculannya di Indonesia pada tahun 2010, pandangan pro dan kontra terjadi pada berbagai kalangan seperti akademisi, pemerintah dan masyarakat berbagai daerah yang penduduknya mayoritas non Muslim. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan melihat prospek dan penerapan strategi pariwisata halal pada masyarakat mayoritas non Muslim di Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder dengan Dinas Pariwisata sebagai informan kunci. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pada analisis data ini menggunakan alat analisis SWOT dan QSPM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi pariwisata di Kabupaten Mamasa memiliki berbagai keterbatasan sehingga menjadi suatu keharusan pemerintah Kabupaten Mamasa untuk mengembangkan pariwisata secara profesional dan menyentuh segmen-segmen baru pariwisata yang sedang berkembang. Kondisi pariwisata halal di Kabupaten Mamasa secara spesifik belum dikembangkan namun prospek penerapan pariwisata halal di Kabupaten Mamasa sangat besar. Strategi penerapan pariwisata halal di Kabupaten Mamasa dapat dilakukan dengan 12 alternatif strategi dengan 3 strategi prioritas.

Kata Kunci: Prospek, Strategi, Pariwisata Halal, SWOT, QSPM.

Abstract,

Various segments of tourism continue to emerge, one of which is halal tourism. However, since its emergence in Indonesia in 2010, views of the pros and cons have occurred in various groups such as academics, government and communities in various regions where the population is predominantly non-Muslim. Based on this, this study aims to look at the prospects and implementation of halal tourism strategies in non-Muslim majority communities in Mamasa Regency, West Sulawesi. This type of research is a qualitative research with a phenomenological approach. Sources of data come from primary and secondary data with the Department of Tourism as the key informant. Data analysis was carried out through three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. In this data analysis using SWOT and QSPM analysis tools. The results of this study indicate that the condition of tourism in Mamasa Regency has various limitations so that it is a must for the Mamasa Regency government to develop tourism professionally and touch new segments of tourism that are developing. The conditions for halal tourism in Mamasa Regency have not specifically been developed, but the prospect of implementing halal tourism in Mamasa Regency is very large. The strategy for implementing halal tourism in Mamasa Regency can be done with 12 alternative strategies with 3 priority strategies.

Keywords: Prospect, Strategy, Halal Tourism, SWOT, QSPM

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang mendapatkan perhatian besar oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena angka pertumbuhannya dari tahun 2015-2019 terus mengalami pertumbuhan positif hingga diatas 50 persen selama 5 tahun (Badan Pusat Statistik, 2020). Sejumlah targetan kinerja pemerintah pada sektor pariwisata dalam rancangan strategi 2020-2024 yang ditetapkan melalui Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) antara lain peningkatan devisa dari 3,3-4,8 miliar dollar di tahun 2020 menjadi 21,5-22,9 miliar dollar di tahun 2024 dan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) 4,0 persen tahun 2020 menjadi 4,5 persen di tahun 2024.

Dalam rangka merealisasikan targetan-targetan tersebut pembenahan serta pengembangan pariwisata terus digalakkan. Berbagai segmen dari pariwisata itu sendiri terus bermunculan salah satu adalah pariwisata halal yang menjadi trend di dunia internasional. Negara yang berpenduduk non Muslim pun banyak mengembangkan pariwisata halal, yang dikenal dengan istilah *friendly tourism* atau *sharia tourism* dengan tujuan mendorong kunjungan wisatawan Muslim dari negara yang mayoritas beragama Islam. Tarigan dan Basid (2020) mengatakan terdapat enam sektor ekonomi global yang berkembang terkait istilah halal: makanan (*halal food*), keuangan (*Islamic finance*), pariwisata (*halal travel*), mode/pakaian (*modest fashion*), media (*halal media & recreation*), dan farmasi (*halal pharmaceuticals & cosmetics*).

Indonesia sendiri merupakan negara yang berada diposisi pertama dengan toreh skor 78 pada tahun 2019 sebagai negara Muslim tujuan wisata halal (Rita, Bisnis.com 2019). Hal inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan segmen pariwisata halal. Namun sejak kemunculannya pada tahun 2010, pandangan pro kontra terjadi pada kalangan akademisi mengenai hal ini. Sebagian apatis dan berpandangan bahwa konsep pariwisata halal adalah konsep yang melahirkan kodifikasi agama dan eksklusifisme sehingga mereka cenderung menolak (Makhasi dan Rahimmadhi, 2020).

Awalia (2017) menjelaskan bahwa jargon wisata halal hanya dikodifikasi oleh segelintir kelompok kepentingan. Wisata halal hanya jargon manis tentang kesejahteraan yang tidak akan mungkin dinikmati oleh kalangan marjinal. Lebih lanjut dijelaskan bahwa wisata halal akan menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat karena persoalan pluralitas NTB. Spiritual menjadi gaya hidup baru telah memainkan peran penting dalam mengkonsumsi Islam untuk menandakan identitas keislaman mereka seperti gaya hidup halal. Lanjut Utama mengatakan proses kodifikasi agama yang dipadukan antara kesalehan Islam dan kapitalisme ini cenderung menyederhanakan Islam sebagai prosesi material daripada prosesi spiritual (Utama, 2015).

Sedangkan pandangan dari akademisi yang pro terhadap pariwisata halal mengatakan bahwa hal ini penting untuk dikembangkan seiring dengan berkembangnya gaya hidup baru yang religious (Makhasi dan Rahimmadhi, 2020). Chandra (2014) melihat bahwa wisata halal merupakan “new gold” atau potensial baru yang mesti dikembangkan karena melihat pertumbuhan populasi Muslim diseluruh dunia begitu cepat. Selanjutnya Menurut Mohsin dkk, wisata halal adalah sebuah “emerging opportunities” seiring berkembangnya segmen pasar yang meminatinya. Ia mengatakan bahwa konsumen pariwisata halal adalah pengguna barang dan jasa yang memenuhi persyaratan halal. Maka kemudian minat spesifik dari konsumen ini sudah seharusnya dihormati oleh industri dengan mempertemukan minat spesifik konsumen dengan industri yang menyediakannya.

Bukan hanya pada kalangan akademisi, pada kalangan pemerintah dan masyarakat lokal yang merupakan bagian daripada pelaku pariwisata juga mengalami pro kontra mengenai pariwisata halal ini. Sebagai akibat dari ketidakpahaman tentang konsep pariwisata halal baik dari pemerintah maupun masyarakat yang mengakibatkan terjadinya penolakan diberbagai daerah khususnya daerah dengan mayoritas penduduknya non Muslim. Salah satu contohnya adalah pemerintahan Provinsi Bali yang menolak dan menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap konsep pariwisata halal untuk diterapkan di Bali (Makhasi dan Rahimmadhi, 2020). Kemudian Rhyan Rumpak (IDN Times Sulsel, 2019) berpendapat pada gejolak penolakan pariwisata halal di Tanah Toraja dan Toraja Utara Sulawesi Selatan.

Pro dan kontra yang terjadi dapat dinilai bahwa sebagian akademisi, pemerintah dan masyarakat menganggap konsep pariwisata halal hadir untuk mencoba melabelisasi antara halal dan haram daripada objek wisata diberbagai daerah mayoritas non Muslim dan mengkotak-kotakkan objek wisata secara agama atau mengislamisasi. Hal demikian tentu jauh dari konsep dasar pariwisata halal, dimana konsep pariwisata halal lebih menekankan pada keramahtamahan pelayanan yang memenuhi standar nilai-nilai dalam Islam.

Dalam perencanaan pengembangan pariwisata Prov. Sulawesi Barat tahun 2014-2034 menetapkan Kabupaten Mamasa sebagai kawasan strategis pengembangan wisata sosial-budaya. Merupakan penyelarasan dari Peraturan Gubernur No. 15 tahun 2008 yang menetapkan Kabupaten Mamasa sebagai destinasi pariwisata unggulan Sulawesi Barat. Sebagai sebuah kawasan strategis pengembangan wisata yang dirancang untuk menjadi daerah tujuan wisata, Kabupaten Mamasa tidak terlepas dari berbagai sorotan wacana dalam pengembangan industri pariwisatanya.

Kurang mendukungnya sarana dan prasarana akomodasi wisata seperti hotel/penginapan yang ramah Muslim sebagaimana yang diungkap Bapak Efendi dan Ibrahim memang masih sangat minim. Hanya ada 6 kecamatan yang memiliki penginapan dari 16 kecamatan yang terdapat objek wisata. Struktur masyarakat Kabupaten Mamasa 80

persen lebih merupakan mayoritas non Muslim mengakibatkan tingkat kepercayaan wisatawan Muslim terhadap pariwisata di Kabupaten Mamasa akan tersedianya makan dan minuman halal sangat rendah apalagi legalitas terhadap sajian makanan dan minuman sebagai suatu legitimasi terhadap layanan kepada wisatawan Muslim belum ada. Penelitian yang mengkaji pariwisata halal di daerah dengan jumlah penduduk mayoritas non Muslim belum banyak dilakukan. Sehingga kajian yang menitikberatkan pada penerapan pariwisata halal di daerah dengan penduduk mayoritas non Muslim, merupakan hal kebaruan yang diangkat dalam artikel ini. Atas dasar hal tersebut, peneliti melihat bahwa prospek dan strategi penerapan pariwisata halal pada masyarakat mayoritas non Muslim penting untuk dilakukan. Hal ini sangat diperlukan untuk mendorong kemajuan pariwisata di Kabupaten Mamasa.

TINJAUAN TEORITIK

Pariwisata halal bukan berarti dikhususkan hanya kepada umat Islam seperti pariwisata *Islamic* yang mengolaborasi aspek motivasi religiositas Islam dan relaksasi keagamaan (Lenggogeni, 2017) atau pariwisata syariah yang lebih menekankan pada prinsip-prinsip syariah dalam berwisata, yang kecenderungannya membatasi hanya pada masyarakat Muslim (Surur, 2020). Battour dan Ismail (2015) mengatakan wisata halal merupakan segala penggunaan objek atau tindakan yang diperbolehkan menurut ajaran Islam untuk digunakan dalam penyediaan produk dan jasa wisata bagi konsumen (dalam hal ini adalah Muslim). Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Nidya bahwa pariwisata halal merupakan perjalanan wisata yang memberikan pelayanan dan fasilitas terhadap wisatawan Muslim yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, seperti makanan dan minuman yang halal serta tempat peribadahan (Sayekti, 2019). Dikuatkan oleh Wuryasti (Detik.com, 2019) yang mengatakan wisata halal adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim”.

Kemenpar mendefinisikan *halal tourism* adalah kegiatan yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang yang memenuhi ketentuan syariah (Palupi 2017). Dalam ketetapan Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 dalam rangka mendukung pariwisata halal dimana fatwa ini menetapkan ketentuan destinasi wisata untuk memenuhi fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah serta tersedianya makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya oleh MUI di sekitar objek wisata dan hotel/penginapan (Sayekti, 2019). Menurut Arief Yahya pariwisata halal terbagi ke dalam dua terminology atau pendekatan. Pertama, adalah pendekatan secara umum yang masih beranggapan bahwa Pariwisata Halal merupakan Wisata Religi. Kedua, yang beranggapan bahwa Pariwisata Halal adalah sama seperti pariwisata pada umumnya

hanya menyiapkan extended service (layanan tambahan) bagi wisatawan Muslim. Secara generik, Pariwisata Halal di antaranya adalah dapat berupa wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan dalam bingkai wisata keluarga (*halal lifestyle*) (Djakfar, 2017).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang dijadikan tempat penelitian adalah Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Oktober hingga Desember 2021. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Jenis penelitian ini dapat memberikan rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit ditangkap dan diungkapkan melalui penelitian yang bersifat kuantitatif (Nugrahani, 2014). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik serta dengan caradeskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan fenomenologi yang dilakukan dengan menghimpun data berdasarkan konsep, fenomena atau peristiwa, pendapat, pendirian sikap, penilaian dan memberikan makna terhadap situasi tertentu atau pengalaman dalam kehidupan. Fenomenologi mencoba menjelaskan dan mengungkap pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu (Gunawan, 2016).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *observasi*, wawancara, dokumentasi dan analisis dari bahan-bahan tertulis. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder dengan Subjek dalam penelitian ini adalah informan yang dipilih dengan menggunakan teknik snowball sampling. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan maupun dariinforman. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara dengan mempelajari berbagai literatur (Amiruddin dan Asikin 2004). Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiono, 2017) dengan menggunakan alat analisis SWOT dan QSPM dengan menelaah semua data-data yang diperoleh dari berbagai sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prospek Pariwisata Halal di Kabupaten Mamasa

Prospek pariwisata halal merupakan suatu peluang untuk menerapkan suatu agenda pariwisata tertentu pada daerah tujuan wisata yang bertujuan untuk memajukan

kepariwisataan daerah secara lebih baik dari kondisi saat ini. Berbicara terkait prospek pariwisata halal, Kabupaten Mamasa sebagai suatu Kabupaten dengan mayoritas krtisten terbesar di Sulawesi Barat memiliki berbagai peluang dalam penerapan segmen baru dari pariwisata tersebut agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan produk domestik regional bruto. Adapun prospek pariwisata halal di Kabupaten Mamasa dapat dilihat dari berbagai aspek berikut:

a. *Demografis Penduduk Sulawesi Barat Mayoritas Islam*

Demografi penduduk Sulawesi Barat sendiri sebagai suatu provinsi di Indonesia yang terbentuk pada tahun 2004 memiliki demografi kependudukan berdasarkan agama adalah mayoritas Islam. Adapun penduduk Sulawesi Barat berdasarkan pemeluk agama dapt dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Presentase Jumlah Penduduk Sulawesi Barat Berdasarkan Pemeluk Agama

Kabupaten	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya	Jumlah
Majene	99,66	0,16	0,10	0,05	0,03	0,00	100,00
Polewali Mandar	95,04	4,13	0,58	0,23	0,02	0,00	100,00
Mamasa	22,72	70,23	4,20	2,82	0,03	0,00	100,00
Mamuju	81,52	16,11	0,67	1,64	0,05	0,00	100,00
Mamuju Utara	85,83	7,87	1,60	4,66	0,04	0,00	100,00
Mamuju Tengah	79,04	12,43	1,70	6,56	0,27	0,00	100,00
Total	80,24	16,18	1,30	2,22	0,06	0,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan temuan penelitian dapat dilihat bahwasanya secara demografi Sulawesi Barat merupakan provinsi dengan struktur penduduknya mayoritas Islam dengan angka 80 persen lebih. Dimana dari 6 kabupaten di Sulawesi Barat ada 5 kabupaten yang berpenduduk mayoritas Islam dan hanya Kabupaten Mamasa sendiri yang mayoritas penduduknya mayoritas kristen. Hal ini dapat disimpulkan bahwa potensi wisatawan Muslim yang ada di 5 Kabupaten di Sulawesi Barat sebagai target pariwisata Kabupaten Mamasa sangat besar.

b. *Perspektif Positif Masyarakat Terkait Pariwisata Halal*

Perspektif adalah pikiran seseorang yang diwujudkan dengan cara pandang yang digunakan terhadap sesuatu. Perspektif mudah dipengaruhi terhadap beberapa hal sehingga cara pandang dapat menjadi bias tak terkecuali terhadap pariwisata halal. Berdasarkan observasi lapangan, perspektif masyarakat terhadap penerapan pariwisata halal ini dipandang baik dan positif oleh masyarakat. Hal ini didukung dengan pernyataan yang diungkapkan Bapak Andarias yang mengatakan:

“Di Mamasa tidak ada masalah, yang jelas mereka mengetahui dan mereka paham dulu terkait wisata halal. Karena pola pikir masyarakat kota dan desa berbeda, jangan sampai mereka tersinggung ketika dikatakan tidak halal. Padahal hanya persoalan

makanan dan beberapa fasilitas ibadah misalnya. Mereka belum memahami terkait wisata halal, sehingga perlu pemerintah masuk untuk memahamkan”

Sejalan dengan pandangan Bapak Andarias, Ibu Lepina juga mengatakan bahwa:

“Saya kira hal demikian bagus, karena apapun yang dilakukan selama positif dan mementingkan orang banyak kita harus terima dengan terbuka dan betul-betul harus mendukung. Hanya saja ketika dilakukan di desa khususnya di Kabupaten Mamasa perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsep pariwisata halal tersebut karena di Kabupaten Mamasa mayoritas orang Kristen sehingga secara otomatis mereka tidak mengetahui dan boleh jadi mereka berpandangan hal ini membuat kekacauan saja. Tentu tidak boleh disalahkan karena pemahaman dan kemampuan berfikir masyarakat hanya sampai disitu. Sehingga perlu ada sosialisasi yang dapat disampaikan melalui kerukunan umat Kristen atau lainnya.”

Dari hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwasanya masyarakat menilai baik tentang konsep ini namun perlu adanya tindakan seperti sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat agar tidak menjadi suatu masalah dalam masyarakat. Hal ini kemudian sejalan dengan pandangan Kepala Bidang Promosi yang mengatakan bahwa :

“Yang pertama saya lebih kepada perubahan pola pikir masyarakat Mamasa. Kita merubah pola pikir mereka terkait halal dan tidak halal dan saya lebih cenderung kepada hygiene-nya atau cara pengelolaan makanannya, hal itu mesti secara professional, menarik dan layak dulu”

Kabid Promosi pariwisata mengungkapkan perubahan pola pikir masyarakat lebih utama terkait pariwisata halal ini. Berbeda dengan Bapak Suhadi selaku anggota DPRD Kabupaten Mamasa, sekalipun beliau mendukung namun untuk penerapan pariwisata halal di Mamasa perlunya dinas terkait menghadirkan regulasi-regulasi yang dibutuhkan terlebih dahulu.

“Secara pribadi saya sangat mendukung, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tanpa di branding, di Mamasa toleransi umat beragama sangat luar biasa, antar umat beragama itu saling memahami. Terkait penerapan pariwisata halal, dinas terkait harus menyiapkan regulasi-regulasi yang mereka butuhkan, setelah regulasi itu ada baru masuk dalam bentuk kegiatan dan sejenisnya”

Wawancara di atas, dapat di lihat lebih menekankan pada regulasi yang mengatur terkait pariwisata halal apabila kemudian hari diterapkan baik dalam bentuk perda dan atau lainnya, terkait hal ini Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Mamasa menerangkan bahwa :

“Dari sisi kebijakan secara tertulis belum ada, baik dalam bentuk peraturan daerah atau yang lainnya belum. Tapi hal pasti kita akan perhatikan karena kita sadar bahwa memang hal ini tidak bisa dikesampingkan”

Berdasarkan hasil lapangan yang diperoleh, dapat diketahui bahwasanya penerapan pariwisata halal dipandang positif oleh masyarakat namun diperlukan penyesuaian konsep dan batasan-batasannya baik dalam bentuk sosialisasi, pembinaan dan pelatihan ataupun penyuluhan kepada masyarakat serta pengupayaan pembuatan kebijakan-kebijakan khusus apabila pariwisata halal ini diterapkan.

c. *Pengembangan Pariwisata Halal di Kabupaten Kompetitor Belum Dikembangkan*

Pengembangan merupakan segala usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan maupun daerah atau seseorang untuk membangun dan membesarkan sesuatu hal yang terkait dengan usaha. Sebagaimana Pengembangan pariwisata halal dengan menjamin segala kebutuhan mendasar dari wisatawan Muslim seperti ketersediaan makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya serta keberadaan fasilitas ibadah pada suatu objek wisata merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan jumlah wisatawan Muslim berkunjung ke Kabupaten Mamasa mengingat mayoritas penduduk Sulawesi Barat dan Indonesia merupakan mayoritas Islam sedangkan Kabupaten Mamasa sendiri berpenduduk Mayoritas Non Muslim.

Letak Kabupaten Mamasa yang berdekatan/berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara yang merupakan pusat pariwisata budaya di Sulawesi Selatan secara budaya dan kesukuan serta struktur kependudukan memang hampir mirip. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Rahmat selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa, Beliau mengatakan bahwa :

“Mamasa secara geografis, kultur dan budaya itu memang punya keunikan, memang kami tidak pungkiri bahwa Kabupaten Mamasa ini tetangga dan berbatasan dengan toraja, jujur memang sesungguhnya Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Tanah Toraja serta Toraja Utara ini sama-sama suku Toraja tapi punya keunggulan masing-masing”

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya Kabupaten Mamasa, Tanah Toraja dan Toraja Utara merupakan kabupaten dengan kesukuan yang sama serta sama-sama berada di dataran tinggi di tengah-tengah pegunungan sehingga pariwisata budaya di tiga kabupaten ini boleh dikatakan hampir sama. Sekalipun perkembangan pariwisata di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara telah berkembang pesat jauh di atas perkembangan pariwisata di Kabupaten Mamasa namun berdasarkan hasil observasi penelitian, pengembangan pariwisata halal di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara sebagai kabupaten kompetitor yang memiliki kebudayaan yang sama belum begitu di kembangkan. Adanya penolakan yang terjadi dalam upaya penerapan pariwisata halal di dua Kabupaten ini.

Berdasarkan temuan di atas dapat dinilai prospek pariwisata halal di Kabupaten Mamasa sangat besar melihat penduduk Sulawesi Barat mayoritas Islam, letak geografis Kabupaten Mamasa berada ditengah-tengah yang menawarkan suguhan budaya dan alam yang asri dan sejuk, perspektif positif masyarakat terkait pariwisata halal dan pengembangan pariwisata halal di kabupaten kompetitor belum terlalu dikembangkan.

Strategi Pariwisata Halal di Kabupaten Mamasa

Perumusan strategi pariwisata halal di Kabupaten Mamasa akan dirumuskan menggunakan matriks analisis SWOT dan QSPM. Matriks analisis SWOT merupakan matriks yang menginteraksikan faktor strategis internal dan eksternal. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman (eksternal) yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan (internal) yang dimiliki. Sedangkan analisis QSPM atau *quantitative strategic planning matrix* merupakan tahap 3 dari kerangka analitis perumusan strategi. Teknik ini secara obyektif menunjukkan strategi mana yang terbaik. Berikut merupakan tabel analisis SWOT dan QSPM yang dibuat oleh peneliti atas beberapa temuan lapangan dan dilakukan analisis dalam pembahasan mengenai penelitian “Prospek dan Strategi Pariwisata Halal di Kabupaten Mamasa”.

Tabel 2. Hasil Matriks Analisis SWOT

		Eksternal	
		Opportunities (O)	Threats (T)
Identification of factors		1. Kabupaten Mamasa strategis karena berada di tengah-tengah dan berbatasan dengan Kab. Tanah Toraja dan Toraja Utara. 2. Perkembangan pesat teknologi dan informasi di era industri 4.0 sebagai ruang promosi. 3. Kebijakan pengoperasian kembali bandara sumatorong oleh pemerintah pusat. 4. Penetapan Kab. Mamasa sebagai kawasan strategis pengembangan wisata Prov. Sulawesi Barat. 5. 80 persen penduduk Sulawesi Barat mayoritas Islam.	1. Pariwisata terdampak COVID- 19 2. Gempa bumi yang berkepanjangan berdampak pada pariwisata 3. Kondisi geografis di pegunungan rawan terjadi longsor 4. Kualitas destinasi wisata kompetitor dengan daya tarik wisata yang serupa lebih unggul. 5. Wisatawan Muslim sering merasa kurang nyaman dan aman terhadap ketersediaan makanan halal dan keinginan serta ketersediaan fasilitas sholat.
Internal	Strength (S)	S vs O	S vs T
	1. Kab. Mamasa memiliki 37 wisata sosial budaya yang sangat menarik dan unik. 2. Kab. Mamasa memiliki 42 wisata alam yang sangat menarik dan beragam. 3. Kab. Mamasa memiliki 6 wisata agrowisata dan buatan yang sangat menarik dan beragam. 4. Keberadaan wisata tracking gunung tertinggi di Prov.	1. Memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi sebagai ruang promosi untuk menciptakan Kabupaten Mamasa sebagai kawasan wisata di Prov Sulawesi Barat. (S1, S2, S3, S4, O2, O4) 2. Memanfaatkan sikap keterbukaan, keramah-tamahan, toleransi, dan sikap menghargai serta menghormati dalam masyarakat untuk menarik	1. Mengelola secara professional objek dan daya tarik wisata serta menonjolkan wisata alam unggulan dan memanfaatkan sikap keterbukaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati dalam masyarakat agar dapat bersaing dengan kompetitor/kabupaten lain. (S1, S2, S3, S4, S5, S6, T4)

<p>5. Keterbukaan masyarakat terhadap orang asing.</p> <p>6. Toleransi, saling menghargai dan menghormati dalam masyarakat sangat kuat.</p> <p>7. Sikap ramah dan tolong-menolong dalam masyarakat sangat besar.</p> <p>8. Minat masyarakat dalam pengembangan pariwisata sangat besar.</p>	<p>wisatawan muslim yang mayoritas di Sulawesi Barat. (S5, S6, S7, O5)</p> <p>3. Memanfaatkan pengoperasian kembali bandara udara serta minat masyarakat yang besar dalam pengembangan pariwisata untuk dipadusertakan dengan pariwisata Kab. Tanah Toraja dan Toraja Utara. (S8, O1, O3)</p>	<p>2. Memanfaatkan minat masyarakat yang besar dalam pengembangan pariwisata untuk menciptakan kenyamanan dan rasa aman terhadap wisatawan muslim dengan menyediakan makanan halal dan penginapan serta fasilitas untuk sholat saat berwisata di Kab. Mamasa. (S8, T5)</p> <p>3. Mendorong sikap tolong-menolong dalam masyarakat untuk bersama-sama menghadapi penyebaran COVID-19, gempa bumi dan bencana alam lainnya seperti longsor yang berdampak pada semua sektor termasuk pariwisata. (S7,T1,T2,T3)</p>
Weakness (W)	W vs O	W vs T
<p>1. Akses dan moda transportasi menuju objek wisata masih minim dan mahal.</p> <p>2. PAD dan PDRB sektor pariwisata masih rendah</p> <p>3. Keterisoliran sebagian wilayah dalam hal jaringan telekomunikasi dan internet.</p> <p>4. Promosi objek wisata melalui media cetak dan online belum optimal.</p> <p>5. Kemampuan SDM dan Modal dalam pengelolaan pariwisata yang terbatas.</p> <p>6. Landasan tentang rancangan induk pengelolaan objek (RIPO) wisata belum rampung</p> <p>7. Masyarakat mayoritas non muslim kurang memahami pengelolaan pariwisata yang ramah terhadap wisatawan muslim.</p> <p>8. Penginapan dan rumah makan standar</p>	<p>1. Merampungkan aturan pariwisata, memperbaiki akses, menyediakan sarana prasarana dan moda transportasi murah serta memanfaatkan pengoperasian kembali bandara udara agar tercipta kawasan pariwisata strategi yang di padusertakan dengan pariwisata budaya Kab. Tanah Toraja dan Toraja Utara untuk meningkatkan PAD dan PDRB. (W1, W2, W3, W6, O1, O3, O4)</p> <p>2. Membangun SDM professional dan Memperbesar modal pengelolaan serta mengoptimalkan promosi objek dan daya tarik wisata melalui media cetak dan online sebagai ruang promosi yang berkembang pesat di era industry 4.0. (W4, W5, O2)</p> <p>3. Memberikan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat terkait pengelolaan pariwisata yang ramah terhadap wisatawan</p>	<p>1. Meningkatkan anggaran dan Modal dalam pengelolaan pariwisata untuk mengatasi penyebaran COVID- 19 dan bencana alam lainnya. (W5, T1, T2, T3)</p> <p>2. Merampungkan aturan pariwisata, memperbaiki akses, menyediakan sarana prasarana dan moda transportasi murah serta mengoptimalkan promosi objek dan daya tarik wisata. Sehingga dapat bersaing dengan kualitas destinasi wisata kompetitor untuk meningkatkan PAD dan PDRB. (W1, W2, W3, W4, W6, T4)</p> <p>3. Memastikan pengelolaan pariwisata yang ramah terhadap Muslim dengan menyediakan penginapan dan rumah makan yang berstandar halal serta fasilitas musholla atau tempat beribadah untuk memberikan kenyamanan dan rasa aman terhadap</p>

	wisatawan muslim masih terbatas. 9. Sertifikat halal dan pengawasan rumah makan dan penginapan belum ada. 10. Musholla atau tempat beribadah pada objek wisata sangat minim.	Muslim, memperadakan sertifikat halal dan penyediaan musholla sehingga membangun kepercayaan terhadap penduduk di Sulawesi Barat yang mayoritas Islam. (W7, W8, W9, W10, O5)	wisatawan Muslim. (W7, W8, W9, W10, T5)
--	--	--	---

Sumber : Penelitian, 2021

Dari penyusunan matriks SWOT di atas, ditemukan 12 (dua belas) alternatif strategi dalam menerapkan pariwisata halal di Kabupaten Mamasa yang terbagi dalam 4 (empat) jenis strategi sebagai berikut :

a. Strategi SO (Kekuatan-Peluang)

- 1) Memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi sebagai ruang promosi untuk menciptakan Kabupaten Mamasa sebagai kawasan wisata di Prov Sulawesi Barat.
- 2) Memanfaatkan sikap keterbukaan, keramahmataman, toleransi, dan sikap menghargai serta menghormati dalam masyarakat untuk menarik wisatawan muslim yang mayoritas di Sulawesi Barat.
- 3) Memanfaatkan pengoperasian kembali bandara udara serta minat masyarakat yang besar dalam pengembangan pariwisata untuk dipadusertakan dengan pariwisata Kab. Tanah Toraja dan Toraja Utara.

b. Strategi ST (Kekuatan-Ancaman)

- 1) Mengelola secara professional objek dan daya tarik wisata serta menonjolkan wisata alam unggulan dan memanfaatkan sikap keterbukaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati dalam masyarakat agar dapat bersaing dengan kompetitor/kabupaten lain.
- 2) Memanfaatkan minat masyarakat yang besar dalam pengembangan pariwisata untuk menciptakan kenyamanan dan rasa aman terhadap wisatawan muslim dengan menyediakan makanan halal dan penginapan serta fasilitas untuk sholat saat berwisata di Kab. Mamasa.
- 3) Mendorong sikap tolong-menolong dalam masyarakat untuk bersama-sama menghadapi penyebaran COVID-19, gempa bumi dan bencana alam lainnya seperti longsor yang berdampak pada semua sektor termasuk pariwisata.

c. Strategi WO (Kelemahan-Peluang)

- 1) Merampungkan aturan pariwisata, memperbaiki akses, menyediakan sarana prasarana dan moda transportasi murah serta memanfaatkan pengoperasian kembali bandara udara agar tercipta kawasan pariwisata strategi yang di padusertakan dengan

pariwisata budaya Kab. Tanah Toraja dan Toraja Utara untuk meningkatkan PAD dan PDRB.

- 2) Membangun SDM professional dan Memperbesar modal pengelolaan serta mengoptimalkan promosi objek dan daya tarik wisata melalui media cetak dan online sebagai ruang promosi yang berkembang pesat di era industry 4.0.
- 3) Memberikan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat terkait pengelolaan pariwisata yang ramah terhadap wisatawan Muslim, memperadakan sertifikat halal dan penyediaan musholla sehingga membangun kepercayaan terhadap penduduk di Sulawesi Barat yang mayoritas Islam.

d. Strategi WT (Kelemahan-Ancaman)

- 1) Meningkatkan anggaran dan Modal dalam pengelolaan pariwisata untuk mengatasi penyebaran COVID- 19 dan bencana alam lainnya.
- 2) Merampungkan aturan pariwisata, memperbaiki akses, menyediakan sarana prasarana dan moda transportasi murah serta mengoptimalkan promosi objek dan daya tarik wisata. Sehingga dapat bersaing dengan kualitas destinasi wisata kompetitor untuk meningkatkan PAD dan PDRB.
- 3) Memastikan pengelolaan pariwisata yang ramah terhadap Muslim dengan menyediakan penginapan dan rumah makan yang berstandar halal serta fasilitas musholla atau tempat beribadah untuk memberikan kenyamanan dan rasa aman terhadap wisatawan Muslim.

Adapun Hasil matriks QSPM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Hasil Matriks QSPM

Total TAS Alternative strategi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	3,73	3,77	3,67	4,77	3,97	2,50	4,30	3,41	3,67	2,94	3,82	3,98		
Strategi Tahap 1 (satu) Prioritas				4,77				4,30					3,98	
Strategi Tahap 2 (Dua)	3,77					3,97							3,82	
Strategi Tahap 3 (Tiga)	3,73		3,67							3,67				
Strategi Tidak Diperhitungkan						2,50		3,41		2,94				

Sumber : Penelitian, 2021

Berdasarkan hasil tabel 28 di atas, pada hasil *Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)* dari 12 (dua belas) strategi yang terdapat pada tahap sebelumnya, terdapat 3 (tiga) strategi prioritas dalam penerapan pariwisata halal di Kabupaten Mamasa diantaranya sebagai berikut :

- a. Mengelola secara professional objek dan daya tarik wisata serta menonjolkan wisata alam unggulan dan memanfaatkan sikap keterbukaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati dalam masyarakat agar dapat bersaing dengan kompetitor/kabupaten lain.

- b. Merampungkan aturan pariwisata, memperbaiki akses, menyediakan sarana prasarana dan moda transportasi murah serta memanfaatkan pengoperasian kembali bandara udara agar tercipta kawasan pariwisata strategi yang di padusertakan dengan pariwisata budaya Kab. Tanah Toraja dan Toraja Utara untuk meningkatkan PAD dan PDRB.
- c. Memastikan pengelolaan pariwisata yang ramah terhadap Muslim dengan menyediakan penginapan dan rumah makan yang berstandar halal serta fasilitas musholla atau tempat beribadah untuk memberikan kenyamanan dan rasa aman terhadap wisatawan Muslim.

Selain dari pada itu terdapat strategi lain yang juga dapat dilakukan dalam menerapkan pariwisata halal di Kabupaten Mamasa yang kemudian masuk dalam strategi tahap 2 (dua) dan Tahap 3 (tiga) adalah sebagai berikut :

- a. Strategi Tahap 2 (dua)
 - 1) Memanfaatkan sikap keterbukaan, keramahtamahan, toleransi, dan sikap menghargai serta menghormati dalam masyarakat untuk menarik wisatawan muslim yang mayoritas di Sulawesi Barat.
 - 2) Memanfaatkan minat masyarakat yang besar dalam pengembangan pariwisata untuk menciptakan kenyamanan dan rasa aman terhadap wisatawan muslim dengan menyediakan makanan halal dan penginapan serta fasilitas untuk sholat saat berwisata di Kab. Mamasa.
 - 3) Merampungkan aturan pariwisata, memperbaiki akses, menyediakan sarana prasarana dan moda transportasi murah serta mengoptimalkan promosi objek dan daya tarik wisata. Sehingga dapat bersaing dengan kualitas destinasi wisata kompetitor untuk meningkatkan PAD dan PDRB.
- b. Strategi Tahap 3 (tiga)
 - 1) Memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi sebagai ruang promosi untuk menciptakan Kabupaten Mamasa sebagai kawasan wisata di Prov Sulawesi Barat.
 - 2) Memanfaatkan pengoperasian kembali bandara udara serta minat masyarakat yang besar dalam pengembangan pariwisata untuk dipadusertakan dengan pariwisata Kab. Tanah Toraja dan Toraja Utara.
 - 3) Memberikan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat terkait pengelolaan pariwisata yang ramah terhadap wisatawan Muslim, memperadakan sertifikat halal dan penyediaan musholla sehingga membangun kepercayaan terhadap penduduk di Sulawesi Barat yang mayoritas Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di dipaparkan maka ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut. Pertama, kondisi pariwisata di Kabupaten Mamasa memiliki berbagai keterbatasan mulai dari cara pengembangan objek wisata prioritas yang tidak berfokus, landasan pengelolaan objek wisata belum rampung, serta saran dan prasarana wisata seperti rumah makan dan perhotelan yang belum memadai di beberapa desa wisata sehingga menjadi suatu keharusan pemerintah Kabupaten Mamasa untuk mengembangkan pariwisata secara profesional dan menyentuh segmen-segmen pariwisata yang sedang berkembang melihat potensi wisata yang besar, dukungan sikap masyarakat yang terbuka dan penuh keramahmatan dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan produk domestik regional bruto sektor pariwisata.

Kedua, prospek pariwisata halal di Kabupaten Mamasa sangat besar melihat penduduk Sulawesi Barat mayoritas Islam, letak geografis Kabupaten Mamasa berada ditengah-tengah yang menawarkan suguhan budaya dan alam yang asri dan sejuk, perspektif positif masyarakat terkait pariwisata halal dan pengembangan pariwisata halal di kabupaten kompetitor belum terlalu dikembangkan.

Ketiga, pnerapan pariwisata halal di Kabupaten Mamasa dapat di lakukan dengan 12 alternatif strategi yang di temukan pada tahap analisis SWOT dengan 3 strategi prioritas yang di temukan pada tahap analisis QSPM.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Cet.II; Jakarta: Rajawali pers, 2004)
- Awalia, Hafizah. “Komodifikasi Pariwisata Halal NTB dalam Promosi Destinasi Wisata Islami di Indonesia”, *Jurnal Studi Komunikasi* 1 no. 1, (2017), h. 19-30
- Badan Pusat Statistik : *Statistik Indonesia 2020*
- Battour, Mohamed dan Mohd Nazari Ismail “Halal tourism: Concepts, practices, challenges and future” *Tourism Management Perspectives* 19 part B (2015): h. 150-154
- Chandra, Geetanjali Ramesh. “Halal Tourism: A New Gold Mine for Tourism”, *International Journal of Business Management & Research* 4 no. 6, (2014): h. 45-62.
- Djakfar, Muhammad “Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia”, (Malang: UIN-Maliki Press 2017)
- Demaniq, Janianto dan Helmut F Weber. *Perencanaan Ekowisata : Dari Teori Ke Aplikasi*. (Yogyakarta : Andi 2006)
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*, (Cet IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2016)

- Lenggogeni, Sari. *Pariwisata Halal: Konsep, Destinasi dan Industri, Creatourism*. Jakarta: PT. Mujur Jaya, 2017
- Mesakaraeng, Semuel. "Anda Muslim Dan Mau Liburan Ke Mamasa Ini 8 Rumah Makan Halal" *Tribuntimur*, 12 Maret 2019. Diakses secara online pada tanggal 14 Maret 2021
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya. 2010)
- Makhasi, Ghifari Yuristiadhi Masyhari dan Muhammad Thohir Yudha Rahimadhi. "Ramai-Ramai Menolak Wisata Halal: Kontestasi Politik Identitas Dalam Perkembangan Wisata Halal Di Indonesia", *Jurnal Sosiologi Reflektif* 14 no. 2 (2020), h. 373-388
- Mohsin, Asad dkk., "Halal tourism: Emerging Nugrahani, Farida. *Metode penelitian kualitatif*. (Solo: Cakra Books. 2014)
- Palupi, Majang dkk., "The importance of optimization of Halal tourism: A study of the development of Halal tourism in Indonesia" dalam "Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference-Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth" (2017), t.h.
- "Pariwisata Mamasa Mau Dibawah Kemana?", *Kompasiana*, 18 Juni 2015. Diakses secara online pada tanggal 14 Maret 2021
- Pitana, I Gede dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*. (Yogyakarta: ANDI, 2009)
- Provinsi Sulawesi Barat, "Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034,"
- "Rencana Penerapan Wisata Halal Di Toraja Memicu Polemik", *IDN TIMES SULSEL*, 4 Maret 2019. Diakses secara online pada tanggal 13 Maret 2021
- Rahmayadi, Edy "Respon Polemik Wisata Halal Di Danau Toba" *CNN Indonesia*, 4 September 2019. Diakses secara online pada tanggal 13 Maret 2021
- Febriansyah SE, A. *Keabsahan Data*. t.p, (2017)
- Rencana Strategis KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF 2020-2024
- Sari, Asteria Desi Kartika. "Polemik Wisata Halal Danau Toba, Begini Konsep Yang Ditawarkan", *Bisnis.com*, 2 September 2019. Diakses secara online tanggal 13 Maret 2021
- Utama, Wildan Sena. "Incorporating Spirituality and Market: Islamic Sharia Business and Religious Life in Post-New Order Indonesia", *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 20 no 2 (2015), h. 113-137
- Surur, Fadhil. *Wisata Halal: Konsep dan Aplikasi*. Gowa : Alauddin University Press, 2020.
- "Salah Paham Seputar Wisata Halal", *DW.COM*, 8 November 2019. Diakses secara online pada tanggal 13 Maret 2021
- Sayekti, Nidya Waras. "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia" *Jurnal DPR RI Kajian* 24 no. 3 (2019), h. 159-172
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet I; Jakarta: Alfabeta, 2017)
- Tarigan, Rose Emmaria dan Abdul Basit. "Penolakan Publik terhadap Program Wisata Halal Danau Toba". *Nyimak: Journal of Communication* 4, no. 1 (2020), h. 124-134
- Wuryasti, Fetry. "Wisata Halal Konsep Baru Kegiatan Wisata di Indonesia", *Detik.com*, 30 Oktober 2013. Diakses secara online pada tanggal 13 Maret 2021